



**Pelaksanaan Kebijakan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur  
Pedesaan dalam Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana  
Infrastruktur Pedesaan**

**Agus Muhammad Barkah**

Universitas Garut

[gusbar727@gmail.com](mailto:gusbar727@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaruh implementasi dana infrastruktur pedesaan terhadap pengelolaan dana infrastruktur pedesaan dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori dengan pendekatan teknik evaluasi, teknik analisis yang digunakan dalam pembahasan adalah teknik analisis kausal efektif yang mengkaji dan menganalisis hubungan sebab akibat yang rasional antara pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan, pengelolaan dana infrastruktur pedesaan, dana infrastruktur pedesaan dan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Fokus penelitian adalah kepala desa di Kabupaten Garut dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel atau responden sebanyak 84 orang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana infrastruktur pedesaan dan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan untuk bisnis dapat terwujud apabila pengelolaan dana infrastruktur pedesaan dilaksanakan secara optimal yang didukung oleh implementasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan secara baik dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Dana Infrastruktur Pedesaan, Pengelolaan Dana, Implementasi Kebijakan.

**Abstrak**

*The purpose of writing this research is to discuss the effect of the implementation of rural infrastructure funds on the management of rural infrastructure funds in realizing the effectiveness of the use of rural infrastructure funds. The research method used in this research is the explanatory method with the evaluation technique approach, the analysis technique used in the discussion is the causal effectual analysis technique which examines and analyzes the rational causal relationship between the implementation of rural infrastructure fund policies, the management of rural infrastructure funds and the effectiveness of the use of infrastructure funds. rural. The focus of the study was the village heads in the Garut regency using purposive sampling with a total sample or respondents of 84 people. The results of the discussion show that the implementation of the rural infrastructure fund policy has a significant effect on the management of rural infrastructure funds and the effectiveness of the use of rural infrastructure funds. The conclusion of this study is that the effectiveness of the use of rural infrastructure funds for business can be*

*realized if the management of rural infrastructure funds is implemented optimally which is supported by the implementation of rural infrastructure fund policies properly and sustainably.*

**Keywords:** *Effectiveness, Fund Management, Policy Implementation, Rural Infrastructure Funds.*

## 1 Pendahuluan

Kemajuan suatu negara pada hakikatnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa yang berada dalam wilayah negara tersebut, artinya bahwa tidak ada negara yang maju tanpa ada provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju apabila tanpa adanya kabupaten atau kota yang maju pula, serta tidak ada kabupaten atau kota yang maju tanpa dukungan desa yang maju. Dengan kata lain bahwa suatu negara akan mengalami kemajuan apabila dimulai dari desanya terlebih dahulu yang harus maju.

Keberhasilan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab (Setiawan, 2011).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa, maka berdasarkan ketentuan ini desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dengan lahirnya otonomi daerah tidak hanya berdampak pada pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota, tetapi juga sangat berdampak pada pemerintah Desa. Desa mampu dijadikan tolok ukur keberhasilan kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedesaan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan NKRI dan berada di daerah Kabupaten maupun Kota.

Kaitannya dengan pasal tersebut, mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dalam upaya membangun infrastruktur desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pemberian alokasi Dana Infrastruktur Pedesaan di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang kemudian dtindaklanjuti dengan skema Bantuan Keuangan desa sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten atau Kota dan Desa.

Permasalahan dalam efektivitas alokasi dana infrastruktur pedesaan dijumpai pada kemampuan pengelola dana insfrastruktur pedesaan baik unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum

baik diantaranya tidak tersedianya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan dana infrastruktur pedesaan tersebut.

Permasalahan lainnya adalah belum maksimalnya manajemen dana infastruktur pedesaan oleh Pemerintahan Desa, yang ditunjukkan dengan sumber daya manusia yang berkompeten belum memadai dari sisi kualitas, berdasarkan data yang diperoleh bahwa tenaga administrasi belum semuanya mengetahui dan memahami cara pengelolaan dana infastruktur pedesaan tersebut, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Selain permasalahan tersebut, Pemerintahan Desa dihadapkan dengan adanya kebijakan dana infrastruktur pedesaan. Kebijakan tersebut merupakan bantuan pemerintah provinsi yang dianggarkan melalui APBD provinsi digunakan membangun infrastruktur pedesaan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa maka dari sisi akuntabilitas, kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

## 2 Tinjauan Pustaka

Untuk dapat melaksanakan program dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, Desa sesuai Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Pasal 6, maka kewenangan sebagai berikut: a) kewenangan berdasarkan asal-usul; b) kewenangan lokal berskala Desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d) kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Lynn dalam Iskandar (2017) bahwa manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari proses dan dari hasilnya, sebagai proses harus lebih mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana yang telah ditentukan, sedangkan sebagai hasil akan menggambarkan kesungguhan hati, penggunaan secara efisien akan sumber-sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik melalui proses yang ada.

## 3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua variabel atau lebih berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mengetahui variabel penyebabnya, sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat (causal effectual). Dalam pelaksanaannya maka penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat (*causal effectual*) serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Iskandar, 2017)

Untuk melihat kondisi objektif pada objek penelitian, peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan.

Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi (*population target*) dari penelitian ini adalah para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Garut dengan jumlah responden sebanyak 84 orang. Pembahasan dilakukan atas pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan dan manajemen dana infrastruktur pedesaan sebagai upaya mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan.

#### **4 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

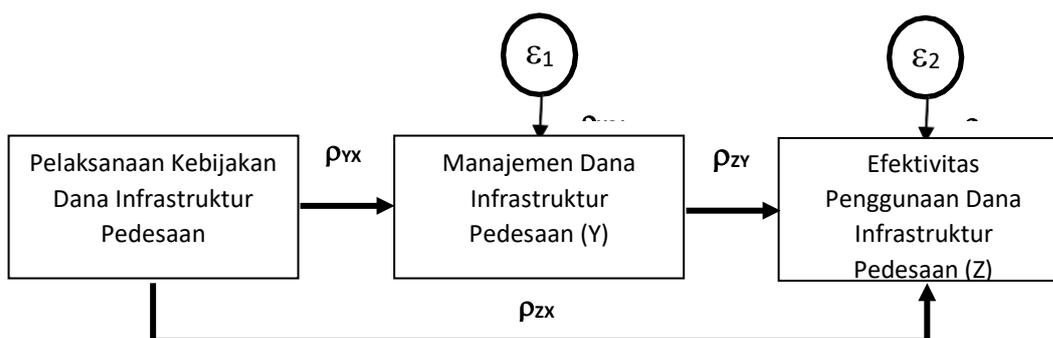
Berdasarkan hasil pengamatan melalui studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa penggunaan dana infrastruktur pedesaan di Kabupaten Garut belum efektif, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya manajemen dana infrastruktur pedesaan dan belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan, diduga disebabkan antara lain:

a. Pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh aspek sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara intensif, dan sumber daya yang mendukung kebijakan dana infrastruktur pedesaan belum tersedia memadai dalam bidang akuntansi publik. Instansi yang terkait dengan transfer dana atau dana dekonstruksi yang diperuntukan bagi desa di Kabupaten Garut yaitu Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut belum optimal dalam sosialisasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan ini, hal ini dapat terlihat masih banyaknya Pemerintahan Desa yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan penggunaan dana atau keuangan desa, kondisi tersebut diduga antara lain kualitas SDM terutama keterampilan akuntansi publik dari perangkat desa yang belum memadai dalam proses penyusunan laporan keuangan atau penggunaan dana yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan.

b. Manajemen dana infrastruktur pedesaan belum maksimal, hal ini ditunjukkan oleh kualitas sumber daya manusia belum memadai dan akuntabilitas laporan penggunaan dana tersebut relatif rendah. Berkaitan dengan kualitas SDM pada Pemerintahan Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan yaitu SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, sehingga pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang dana infrastruktur pedesaan masih rendah yang berakibat pada pengelolaan dana tersebut. Dengan kondisi tersebut maka akuntabilitas laporan penggunaan dana pun dapat dikatakan rendah, diduga keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan para Kepala Desa dan aparat desa.

c. Efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan di berbagai pemerintahan desa dapat dikatakan masih rendah, kondisi ini ditunjukkan dengan kemampuan pengelola dana infrastruktur pedesaan baik unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. sebagian besar tenaga administrasi Pemerintahan Desa belum memiliki keahlian bidang akuntansi publik sehingga masih muncul perbedaan cara atau pengelolaan dana infrastruktur pedesaan dan hal ini tentunya akan berpengaruh pada akuntabilitas laporan. Selain itu, tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan dana infrastruktur pedesaan sehingga berdampak pada transparansi dalam perencanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh dana infrastruktur pedesaan.

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan terhadap manajemen dana infrastruktur pedesaan dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1: Paradigma penelitian

Hasil penelitian menyajikan penghitungan statistika yang digunakan untuk pengujian hipotesis seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2: Hasil penghitungan analisis statistika

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F hitung	F tabel	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan dalam mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan	0,8022	49,1489	2,7188	0,6436	Signifikan

Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	t hitung	t tabel	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan	0,7066	9,0424	1,9901	0,4993	Signifikan
Pengaruh Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan	0,4465	4,4648	1,9901	0,3324	Signifikan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan	0,5622	4,4729	1,9901	0,3111	Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2, maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial pelaksanaan kebijakan dana infrastruktur pedesaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen dana infrastruktur pedesaan dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan.

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan Terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan Dalam Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan**

Hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, artinya variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan dalam mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan. Besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan dalam mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 64,36%, sedangkan sisanya sebesar 35,64% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparatur atau disposisi, dan struktur birokrasi dapat menentukan manajemen dana infrastruktur pedesaan yang pada akhirnya dapat mewujudkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui Pemerintah Kabupaten Garut yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah melaksanakan komunikasi kebijakan berupa sosialisasi mengenai kebijakan dana infrastruktur pedesaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya kepada para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Garut. Komunikasi kebijakan pun dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cara memberikan dokumen-dokumen cetak berupa himpunan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan dari mulai tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait sampai kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut yang mengikat di dalamnya.

Pada faktor sumber daya, hampir sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Garut telah berusaha mematuhi data informasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan sehingga dengan anggaran yang besar ini diharapkan para Kepala Desa maupun perangkatnya dapat meminimalisir pelanggaran yang esensi terhadap aturan yang mengikatnya. Data informasi kepatuhan terhadap kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan selalu dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh Dana Infrastruktur Pedesaan tersebut.

Selain itu, pada faktor struktur birokrasi diketahui para pelaksana kebijakan telah berusaha untuk mewujudkan akuntabilitas yang diwujudkan melalui pertanggungjawaban administratif, teknis maupun keuangan yang dibuat oleh Pemerintahan Desa sebagai dokumentasi bilamana pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut diminta untuk pemeriksaan atau tujuan tertentu karena anggaran yang dikelola adalah anggaran Negara.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan tidak hanya dipengaruhi oleh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan, namun juga dipengaruhi oleh Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan. Dimana manajemen dana infrastruktur pedesaan dapat dilaksanakan jika perencanaan dalam menyusun tujuan organisasi dirumuskan secara berkualitas, pengorganisasian struktur dan tata kerja organisasi disusun secara baik sehingga pelaksanaan tugas sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah disusun sebelumnya, penganggaran pada belanja barang/jasa sesuai dengan program/kegiatan yang direncanakan serta program kerja yang tersaji pada laporan kegiatan sesuai dengan program pada perencanaan.

Selain Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan dan Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan dan Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 35,64% (epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan tersebut salah satunya adalah faktor Kepemimpinan. Salah fungsi kepemimpinan adalah pengambilan keputusan yang baik merupakan salah satu fungsi kepemimpinan, maka akan menghasilkan efektivitas suatu program atau penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat lebih efektif.

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan Terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 49,93% sedangkan sisanya sebesar 50,07% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian .

Hasil pengujian tersebut menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi komunikasi, sumber daya, sikap aparatur atau disposisi, dan struktur birokrasi dapat mendorong meningkatkan Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui sosialisasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut kepada seluruh Kepala Desa, walaupun hasil dari sosialisasi kebijakan tersebut bukan menjadi satu-satunya keberhasilan yang akan berdampak pada manajemen dana infrastruktur pedesaan yang baik. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan dapat berpengaruh terhadap variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan. Artinya Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan semakin baik, maka akan mendorong meningkatnya Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

### **Pengaruh Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan Terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Besar pengaruh variabel Manajemen dana infrastruktur pedesaan terhadap variabel Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 33,24% sedangkan sisanya sebesar sebesar 66,76% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan menjadi faktor penguat dalam mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Garut.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa manajemen dana infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/kegiatan dengan tepat dimana hal ini hanya berupa

masalah teknis saja, ternyata hal tersebut bukan menjadi faktor satu-satunya saja untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pengalokasian anggaran belanja yang disusun berdasarkan program/ kegiatan tersebut terdapat pada dimensi penganggaran (*budgeting*), khususnya pada indikator penggunaan anggaran yang efektif dan efisien..

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan, artinya apabila Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan berjalan dengan maksimal maka akan mendorong Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan lebih optimal.

Selain variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan, terdapat faktor lain (epsilon) yang mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan. Epsilon lainnya yang diduga turut mempengaruhi efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan, yaitu sistem sosial dan harapan seseorang serta integrasi. Elemen proses-proses manusiawi inilah yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian

### **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan Terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan**

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan. Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan secara langsung sebesar 17,80%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan secara tidak langsung melalui Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 13,31%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan sebesar 31,11% sedangkan sisanya sebesar 68,89% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi keterbukaan kebijakan dasar, tujuan dan rencana, strategi, pengorganisasian, pelaksanaan serta target hasil dapat menentukan peningkatan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, rendahnya pengaruh pelaksanaan kebijakan terhadap variabel efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan tersebut terjadi dikarenakan walaupun pelaksanaan kebijakan berupa sosialisasi telah diwujudkan dengan baik, adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dan manajemen dana infrastruktur pedesaan telah diupayakan maksimal, namun hal tersebut bukanlah faktor dominan yang berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan. Variabel lain (epsilon) yang diduga mempengaruhi efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan adalah adaptasi terhadap perubahan regulasi peraturan dan perundang-undangan.

## **5 Simpulan dan Saran**

Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan dalam mewujudkan Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur

Pedesaan. Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Manajemen Dana Infrastruktur Pedesaan. Pelaksanaan Kebijakan Dana Infrastruktur Pedesaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Penggunaan Dana Infrastruktur Pedesaan.

Instansi yang terkait dengan transfer dana atau dana dekonstrasi yang diperuntukan bagi desa di Kabupaten Garut yaitu Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut belum optimal dalam sosialisasi kebijakan dana infrastruktur pedesaan ini, hal ini dapat terlihat masih banyaknya Pemerintahan Desa yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan penggunaan dana atau keuangan desa, kondisi tersebut diduga antara lain kualitas SDM terutama keterampilan akuntansi publik dari perangkat desa yang belum memadai dalam proses penyusunan laporan keuangan atau penggunaan dana yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan.

Berkaitan dengan kualitas SDM pada Pemerintahan Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan yaitu SMA yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, sehingga pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang dana infrastruktur pedesaan masih rendah yang berakibat pada pengelolaan dana tersebut. Dengan kondisi tersebut maka akuntabilitas laporan penggunaan dana pun dapat dikatakan rendah, diduga keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan para Kepala Desa dan aparat desa.

Efektivitas penggunaan dana infrastruktur pedesaan di berbagai pemerintahan desa dapat dikatakan masih rendah, kondisi ini ditunjukkan dengan kemampuan pengelola dana infrastruktur pedesaan baik unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. sebagian besar tenaga administrasi Pemerintahan Desa belum memiliki keahlian bidang akuntansi publik sehingga masih muncul perbedaan cara atau pengelolaan dana infrastruktur pedesaan dan hal ini tentunya akan berpengaruh pada akuntabilitas laporan.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi 1. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- BPS Kabupaten Garut. (2016). *Garut dalam Angka Tahun 2015*. Kabupaten Garut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Echols, Jhon dan Shadily Hassan. (2014). *Kamus Indonesia Inggris*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). *Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- Fahri, Luthfi Nur. (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Jurnal Publik. Vol. 11/ No. 01. pp. 75-88.
- Faridah, dan Bambang Suyono. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vo. 4. No. 5.
- Fattah, Nanang. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Cetakan. 3. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan

- Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu P. (2014). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Heywood, Andrew. (2012). *Political Ideologies: An Introduction*. 5<sup>th</sup> Edition. Palgrave Macmillan. UK.
- Iskandar, Jusman. (2017). *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- Jakarta. Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. PT Buku Kita. Jakarta.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Muntahanah, Siti dan Tjahjani Mudijaningsih. 2014. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Tesis. Universitas Brawijaya.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Poerwadarmanta, W.J.S. (2012). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01. ISSN: 1412-7083. pp. 1-12.
- Riduwan. (2010). *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta. Bandung.
- Rozaki, Abdul, dkk. (2010). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Ire Pres. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Startegis*. Refika Aditama. Bandung
- Siagian, Sondang, P. (2012). *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. (2013). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Sumarsono, Sony. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. (2005). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- \_\_\_\_\_. (2017). *Bunga Rampai Administrasi Negara*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Dinamika Kelompok. Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Cetakan Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Manajemen Publik*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung
- \_\_\_\_\_. (2017). *Teori Administrasi*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Teori Sosial*. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada